

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

**KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

28 OKTOBER 2004

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

3 PENDAHULUAN

4 Tujuan

5 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang
6 mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan
7 pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan
8 bagi:

- 9 (a) penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah
10 dalam melaksanakan tugasnya;
- 11 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah
12 akuntansi yang belum diatur dalam standar;
- 13 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah
14 laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi
15 pemerintahan; dan
- 16 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan
17 informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun
18 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

19 2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan
20 dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan
21 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

22 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka
23 konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar
24 akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini.
25 Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat
26 diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di
27 masa depan.

28 Ruang Lingkup

29 4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 30 (a) tujuan kerangka konseptual;
- 31 (b) lingkungan akuntansi pemerintah;
- 32 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- 33 (d) entitas pelaporan;

- 1 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
2 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat
3 informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta
4 kendala informasi akuntansi; dan
5 (g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang
6 membentuk laporan keuangan.

7 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan
8 keuangan pemerintah pusat dan daerah.

9 **LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

10 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah
11 berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan
12 pelaporan keuangannya.

13 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu
14 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan
15 pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 16 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang
17 diberikan:
- 18 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
 - 19 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan
20 antar pemerintah;
 - 21 (3) adanya pengaruh proses politik;
 - 22 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan
23 pemerintah.
- 24 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
- 25 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target
26 fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 27 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan
28 pendapatan; dan
 - 29 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan
30 pengendalian.

31 **Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan** 32 **Kekuasaan**

33 8. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
34 yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat
35 mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses

1 pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah
2 pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3 Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga
4 keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan
5 kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

6 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan
7 pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan
8 menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan
9 persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak eksekutif
10 melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan
11 perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi
12 tersebut. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas
13 penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan
14 rakyat.

15 **Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer**

16 **Pendapatan antar Pemerintah**

17 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup
18 pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia,
19 yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah
20 kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi
21 arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.
22 Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau
23 bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya
24 sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar
25 entitas pemerintahan.

26 **Pengaruh Proses Politik**

27 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah
28 meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan
29 itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal
30 dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang
31 bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya
32 guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting
33 dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah
34 berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai
35 kepentingan yang ada di masyarakat.

1 **Hubungan antara Pembayaran Pajak dan** 2 **Pelayanan Pemerintah**

3 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah
4 memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada
5 dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari
6 pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada
7 masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan
8 langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada
9 wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan
10 oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib
11 dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan,
12 antara lain sebagai berikut:

- 13 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan
14 yang sifatnya suka rela.
- 15 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan
16 pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
17 undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan
18 yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai
19 kenikmatan yang diperoleh.
- 20 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan
21 dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan
22 dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli
23 pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan
24 kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang
25 biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan
26 dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh
27 pemerintah menjadi lebih mudah.
- 28 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang
29 diberikan pemerintah adalah relatif sulit.

30 **Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan** 31 **Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**

32 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal
33 hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja
34 yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan
35 pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja
36 tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan
37 terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran
38 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi

landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian

15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi

1 yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan
2 pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat
3 diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok
4 dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga
5 perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan
6 keuangan pemerintah.

7 **PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI**

8 **Pengguna Laporan Keuangan**

9 16. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna
10 laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 11 (a) masyarakat;
- 12 (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga
13 pemeriksa;
- 14 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,
15 investasi, dan pinjaman; dan
- 16 (d) pemerintah.

17 **Kebutuhan Informasi**

18 17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
19 bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua
20 kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan
21 pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik
22 dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,
23 berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan
24 pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi
25 kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat
26 perhatian.

27 18. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi
28 yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib
29 memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
30 untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan
31 keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk
32 dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis
33 informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun
34 standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

ENTITAS PELAPORAN

19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

- (a) Pemerintah pusat;
- (b) Pemerintah daerah;
- (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

20. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan

21. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

22. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- (a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

1 pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
2 secara periodik.

3 (b) Manajemen

4 Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan
5 kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan
6 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan
7 dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas
8 dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

9 (c) Transparansi

10 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
11 kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
12 masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
13 dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
14 dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
15 kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
16 undangan.

17 (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

18 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan
19 penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk
20 membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan
21 apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut
22 menanggung beban pengeluaran tersebut.

23 **Tujuan Pelaporan Keuangan**

24 23. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya
25 menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
26 dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik
27 keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

28 (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan
29 periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

30 (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara
31 memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan
32 anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-
33 undangan.

34 (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya
35 ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan
36 serta hasil-hasil yang telah dicapai.

37 (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas
38 pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
39 kebutuhan kasnya.

- 1 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
2 entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber
3 penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka
4 panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan
5 pinjaman.
- 6 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
7 entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau
8 penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
9 periode pelaporan.

10 24. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan
11 keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja,
12 transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas
13 dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

14 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

15 25. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 16 (a) Laporan Realisasi Anggaran;
17 (b) Neraca;
18 (c) Laporan Arus Kas;
19 (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

20 26. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada
21 paragraf 25, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan
22 Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

23 **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

24 27. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan
25 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur
26 keuangan pemerintah, antara lain:

- 27 (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian
28 yang mengatur keuangan negara;
29 (b) Undang-undang di bidang keuangan negara;
30 (c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
31 Negara;
32 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
33 pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan
34 daerah;

- 1 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
2 perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 3 (f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan
4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 5 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur
6 tentang keuangan pusat dan daerah.

7 **ASUMSI DASAR**

8 28. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di
9 lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai
10 suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi
11 dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 12 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 13 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 14 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary*
15 *measurement*).

16 **Kemandirian Entitas**

17 29. Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan
18 maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap
19 sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk
20 menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan
21 antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah
22 satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan
23 entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan
24 tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas
25 pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk
26 kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan
27 atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang
28 yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya
29 program yang telah ditetapkan.

30 **Kesinambungan Entitas**

31 30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa
32 entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan
33 demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan
34 likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

1 **Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary*** 2 ***Measurement*)**

3 31. Laporan keuangan entitas pelaporan harus
4 menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan
5 satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya
6 analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN** 8 **KEUANGAN**

9 32. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah
10 ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi
11 akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat
12 karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang
13 diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
14 kualitas yang dikehendaki:

- 15 (a) Relevan;
- 16 (b) Andal;
- 17 (c) Dapat dibandingkan; dan
- 18 (d) Dapat dipahami.

19 **Relevan**

20 33. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila
21 informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi
22 keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi
23 peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,
24 serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa
25 lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan
26 dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

27 34. Informasi yang relevan :

- 28 (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
29 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
30 mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 31 (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

1 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi
2 masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan
3 kejadian masa kini.

4 (c) Tepat waktu

5 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh
6 dan berguna dalam pengambilan keputusan.

7 (d) Lengkap

8 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
9 mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang
10 dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang
11 melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat
12 dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar
13 kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat
14 dicegah.

15 **Andal**

16 35. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari
17 pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan
18 setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin
19 relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat
20 diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial
21 dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

22 (a) Penyajian Jujur

23 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta
24 peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara
25 wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

26 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

27 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji,
28 dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak
29 yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang
30 tidak berbeda jauh.

31 (c) Netralitas

32 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak
33 berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

34 **Dapat Dibandingkan**

35 36. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan
36 akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan

1 keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas
2 pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan
3 secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat
4 dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang
5 sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat
6 dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan
7 kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan
8 menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada
9 kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut
10 diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

11 **Dapat Dipahami**

12 37. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
13 dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk
14 serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para
15 pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan
16 yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas
17 pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari
18 informasi yang dimaksud.

19 **PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN** 20 **KEUANGAN**

21 38. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
22 dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh
23 pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh
24 penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam
25 melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan
26 dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini
27 adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan
28 pelaporan keuangan pemerintah:

- 29 (a) Basis akuntansi;
- 30 (b) Prinsip nilai historis;
- 31 (c) Prinsip realisasi;
- 32 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- 33 (e) Prinsip periodisitas;
- 34 (f) Prinsip konsistensi;
- 35 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- 36 (h) Prinsip penyajian wajar.

1 **Basis Akuntansi**

2 39. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
3 keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan
4 pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
5 Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
6 ekuitas dalam Neraca.

7 40. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti
8 bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
9 Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja
10 diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/
11 Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak
12 menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran
13 baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada
14 selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan
15 belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk
16 barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

17 41. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset,
18 kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat
19 terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
20 lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
21 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

22 42. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja
23 Keuangan sebagaimana dimaksud pada paragraf 26
24 menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan
25 dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam
26 pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun
27 dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun
28 demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap
29 berdasarkan basis kas.

30 **Nilai Historis (*Historical Cost*)**

31 43. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas
32 yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*)
33 untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban
34 dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan
35 dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang
36 dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

37 44. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada
38 penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
39 Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar
40 aset atau kewajiban terkait.

1 **Realisasi (*Realization*)**

2 45. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang
3 telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu
4 tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja
5 dalam periode tersebut.

6 46. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost*
7 *against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak
8 mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam
9 akuntansi komersial.

10 **Substansi Mengungguli Bentuk Formal** 11 **(*Substance Over Form*)**

12 47. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
13 wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka
14 transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan
15 sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya
16 aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain
17 tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal
18 tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas
19 Laporan Keuangan.

20 **Periodisitas (*Periodicity*)**

21 48. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas
22 pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan
23 sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang
24 dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan
25 adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan
26 semesteran juga dianjurkan.

27 **Konsistensi (*Consistency*)**

28 49. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada
29 kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas
30 pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa
31 tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke
32 metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat
33 diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan
34 mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode

1 lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini
2 diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3 **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

4 50. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap
5 informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang
6 dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan
7 pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan
8 atas Laporan Keuangan.

9 **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

10 51. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar
11 Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
12 Catatan atas Laporan Keuangan.

13 52. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan
14 keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa
15 dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
16 mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
17 pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.
18 Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
19 melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset
20 atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban
21 tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan
22 pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya,
23 pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset
24 atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat
25 kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan
26 keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

27 **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN** 28 **ANDAL**

29 53. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan
30 adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya
31 kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan
32 laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan
33 (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang
34 menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan
35 keuangan pemerintah, yaitu:

- 1 (a) Materialitas;
2 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
3 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

4 **Materialitas**

5 54. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan
6 keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang
7 memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material
8 apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
9 mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan
10 ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

11 **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

12 55. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya
13 melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan
14 pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang
15 manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun
16 demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses
17 pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul
18 oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat
19 mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka
20 yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi
21 lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang
22 dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

23 **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

24 56. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan
25 untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara
26 berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan
27 keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam
28 berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan
29 keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik
30 kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran

57. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

58. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- (c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- (e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (f) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- (g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

1 **Neraca**

2 59. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu
3 entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
4 pada tanggal tertentu.

5 60. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset,
6 kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan
7 sebagai berikut :

8 (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
9 dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
10 lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
11 depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
12 maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
13 termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
14 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
15 daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

16 (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
17 yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
18 daya ekonomi pemerintah.

19 (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang
20 merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

21 **Aset**

22 61. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam
23 aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan,
24 baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional
25 pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan
26 belanja bagi pemerintah.

27 62. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan
28 nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika
29 diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk
30 dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
31 pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria
32 tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

33 63. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi
34 jangka pendek, piutang, dan persediaan.

35 64. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka
36 panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung
37 maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang
38 digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan
39 menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,
40 dan aset lainnya.

1 65. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang
2 diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi
3 dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode
4 akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen
5 dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam
6 Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek
7 pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi
8 permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi
9 permanen lainnya.

10 66. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin,
11 gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap
12 lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

13 67. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset
14 lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud
15 dan aset kerja sama (kemitraan).

16 **Kewajiban**

17 68. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa
18 pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam
19 penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya
20 ekonomi di masa yang akan datang.

21 69. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi
22 pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa
23 lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain
24 karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari
25 masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau
26 lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena
27 perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau
28 dengan pemberi jasa lainnya.

29 70. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum
30 sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan
31 perundang-undangan.

32 71. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka
33 pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek
34 merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu
35 kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban
36 jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang
37 penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak
38 tanggal pelaporan.

39 **Ekuitas Dana**

40 72. Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1 (a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan
2 kewajiban jangka pendek.
- 3 (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah
4 yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan,
5 dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- 6 (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan
7 pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah
8 ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-
9 undangan.

10 Laporan Arus Kas

11 73. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas
12 sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non
13 keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang
14 menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo
15 akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

16 74. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri
17 dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing
18 didefinisikan sebagai berikut:

- 19 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
20 Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 21 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
22 Bendahara Umum Negara/Daerah.

23 Catatan atas Laporan Keuangan

24 75. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan
25 naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan
26 Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas
27 Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan
28 akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi
29 lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam
30 Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang
31 diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan
32 secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan
33 hal-hal sebagai berikut:

- 34 (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,
35 ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang
36 APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang
37 dihadapi dalam pencapaian target;

- 1 (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama
2 tahun pelaporan;
- 3 (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
4 keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih
5 untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
6 kejadian penting lainnya;
- 7 (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar
8 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar
9 muka (*on the face*) laporan keuangan;
- 10 (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban
11 yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
12 pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
13 penerapan basis kas; dan
- 14 (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk
15 penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka
16 (*on the face*) laporan keuangan.

17 **Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan** 18 **Perubahan Ekuitas**

19 76. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi
20 pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.
21 Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai
22 pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional
23 dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

24 77. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan
25 Perubahan Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau
26 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
27 sebelumnya.

28 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

29 78. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses
30 penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau
31 peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian
32 yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana,
33 pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan
34 termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
35 bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah
36 uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh
37 kejadian atau peristiwa terkait.

1 79. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu
2 kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

3 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang
4 berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan
5 mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan
6 yang bersangkutan;

7 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya
8 yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

9 80. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa
10 memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek
11 materialitas.

12 **Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa** 13 **Depan Terjadi**

14 81. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep
15 kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi
16 digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa
17 manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau
18 kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas
19 pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi
20 ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian
21 derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi
22 masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh
23 pada saat penyusunan laporan keuangan.

24 **Keandalan Pengukuran**

25 82. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada
26 nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan
27 pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan
28 pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan
29 biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka
30 pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan
31 atas Laporan Keuangan.

32 83. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa
33 dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah
34 terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa
35 mendatang.

1 **Pengakuan Aset**

2 84. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa
3 depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya
4 yang dapat diukur dengan andal.

5 85. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah
6 antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan
7 bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan
8 negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan
9 pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap
10 unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan
11 banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan
12 penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan
13 akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk
14 pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai
15 penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak
16 diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya
17 dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode
18 akuntansi berjalan.

19 **Pengakuan Kewajiban**

20 86. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
21 pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah
22 dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan
23 perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian
24 yang dapat diukur dengan andal.

25 87. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima
26 atau pada saat kewajiban timbul.

27 **Pengakuan Pendapatan**

28 88. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat
29 diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas
30 pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat
31 timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

32 **Pengakuan Belanja**

33 89. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya
34 pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas
35 pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

1 pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
2 pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
3 perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat
4 timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

5 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

6 90. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang
7 untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
8 keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan
9 menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar
10 pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari
11 imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
12 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

13 91. Pengukuran pos-pos laporan keuangan
14 menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan
15 mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam
16 mata uang rupiah.

17
18
19
20

DAFTAR ISI

1		
2		<u>Paragraf</u>
3	PENDAHULUAN -----	1-5
4	Tujuan -----	1-3
5	Ruang Lingkup -----	4-5
6	LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----	6-15
7	Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan ...	
8	-----	8-9
9	Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan	
10	antar Pemerintah -----	10
11	Pengaruh Proses Politik -----	11
12	Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan	
13	Pemerintah -----	12
14	Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target	
15	Fiskal, dan Alat Pengendalian -----	13
16	Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	
17	-----	14
18	Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan	
19	Pengendalian -----	15
20	PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI -----	16-18
21	Pengguna Laporan Keuangan -----	16
22	Kebutuhan Informasi -----	17-18
23	ENTITAS PELAPORAN -----	19-20
24	PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN -----	21-24
25	Peranan Pelaporan Keuangan -----	21-22
26	Tujuan Pelaporan Keuangan -----	23-24
27	KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN -----	25-26
28	DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN -----	27
29	ASUMSI DASAR -----	28-31
30	Kemandirian Entitas -----	29
31	Kesinambungan Entitas -----	30
32	Keterukuran dalam Satuan Uang (<i>Monetary Measurement</i>)	
33	-----	31
34	KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN -----	32-37
35	Relevan -----	33-34
36	Andal -----	35
37	Dapat Dibandingkan -----	36
38	Dapat Dipahami -----	37
39	PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -----	38-52
40	Basis Akuntansi -----	39-42
41	Nilai Historis (<i>Historical Cost</i>) -----	43-44
42	Realisasi (<i>Realization</i>) -----	45-46
43	Substansi Mengungguli Bentuk Formal (<i>Substance Over</i>	
44	<i>Form</i>) -----	47
45	Periodisitas (<i>Periodicity</i>) -----	48

1	Konsistensi (<i>Consistency</i>)-----	49
2	Pengungkapan Lengkap (<i>Full Disclosure</i>) -----	50
3	Penyajian Wajar (<i>Fair Presentation</i>)-----	51-52
4	KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL -----	53-56
5	Materialitas-----	54
6	Pertimbangan Biaya dan Manfaat -----	55
7	Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif -----	56
8	UNSUR LAPORAN KEUANGAN-----	57-77
9	Laporan Realisasi Anggaran -----	57-58
10	Neraca -----	59-72
11	Aset -----	61-67
12	Kewajiban -----	68-71
13	Ekuitas Dana-----	72
14	Laporan Arus Kas -----	73-74
15	Catatan atas Laporan Keuangan -----	75
16	Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas	
17	-----	76-77
18	PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	78-89
19	Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi	
20	Masa Depan Terjadi -----	81
21	Keandalan Pengukuran-----	82-83
22	Pengakuan Aset -----	84-85
23	Pengakuan Kewajiban -----	86-87
24	Pengakuan Pendapatan-----	88
25	Pengakuan Belanja-----	89
26	PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN-----	90-91
27		